

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan Daerah memiliki makna proses perubahan yang dilakukan dalam skala lokal atau daerah otonom yang memiliki persoalan yang tidak serumit dalam pembangunan nasional (Safi'i,2009). Hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah dimana daerah memiliki kewenakk'ngan untuk melaksanakan pembangunan sesuai yang dikehendaki oleh suatu daerah. Pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi baru bagi pembangunan ekonomi dalam rangka peningkatan nilai kegiatan produktif dan sumber daya manusia(SDM) di daerah. Penjelasan umum UU.Nomor 32 Tahun 2004 dapat dikatakan bahwa kepegawaian daerah adalah suatu sistem yang diatur dalam perundang-undangan meliputi perencanaan persyaratan, pengangkatan, penempatan, pendidikan dan pelatihan, penggajian, pemberhentian, pensiun, pembinaan, kedudukan, hak, kewajiban, tanggung jawab, larangan, sanksi, dan penghargaan merupakan sub-sistem dari sistem kepegawaian nasional.

Salah satu kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah adalah tentang kebijakan pemberian tunjangan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberikan sebagai kompensasi, karena sudah menunjukkan *performance* kinerja yang baik dalam membenahan reformasibirokrasi. Namun besaran tunjangan berbasis kinerja ini diatur sepenuhnya oleh instansi masing-masing.Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam memaksimalkan kinerja pegawainya. Beberapa daerah yang melaksanakan TKD seperti DKI Jakarta,Gorontalo dan beberapa kabupaten di Indonesia. Madjoen (2013) menyebutkan Tunjangan Kinerja Daerah atau TKD adalah penghargaan berupa tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil ataskinerianya dengan tujuan untuk

Kabupaten Buol adalah salah satu kabupaten paling utara disulawesi tengah yang merupakan salah satu kabupaten yang kaya akan potensi alam seperti perikanan, pertambangan, pertanian dan perkebunan dengan topografi datar perbukitan dengan kondisi masyarakat sebagian besar menempati daerah pesisir. Dengan memanfaatkan sektor-sektor unggulan tersebut sepatutnya dapat memberikan nilai tambah bagi pembangunan ekonomi daerah. Disisi lain potensi sektor-sektor unggul tersebut belum mampu meningkatkan pendapatan daerah, masih terjadi ketimpangan pendapatan. Sehingga perlu adanya evaluasi dalam pelaksanaan beberapa kebijakan pemerintah daerah dalam penata kelolaan sumberdaya daerah. Ketersediaan sumber daya manusia yang memadai menjadi kunci terlaksananya program-program pemerintah dalam pembangunan daerah. Sumberdaya manusia (SDM) dalam hal ini termasuk aparatur negara sebagai pelayan publik (PNS).

Pemerintah kabupaten Buol periode 2012-2017 membuat kebijakan yang menghilangkan tunjangan kinerja daerah. Kebijakan ini tidak secara ekplisit dituangkan dalam peraturan pemerintah daerah. Tujuan penghapusan tunjangan kinerja daerah di kabupaten Buol adalah untuk melakukan perubahan dikarenakan pada pemerintahan sebelumnya terlihat membebani anggaran APBDnya dengan kebijakan tebar pesona (Radar sulteng; 12/3/2014). Hal ini menyebabkan kontroversi dilingkungan pegawai karena terkait kesejahteraan pegawai dan menjadi salah satu indikator peningkatan kinerja pegawai.

Penelitian ini dilakukan dalam rangka menganalisis pelaksanaan kebijakan pemberian tunjangan kinerja daerah Kabupaten Buol. Pemberian tunjangan kinerja daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja PNS dan CPNS, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kesejahteraan PNS dan CPNS, dan meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemui hambatan-hambatan. Mengaitkan system pemberian tunjangan dengan upaya peningkatan kinerja pegawai. Lebih khusus lagi, adanya kasdaerah yang

semakin tidak memungkinkan untuk mengadakan tunjangan kinerja daerah sehingga berpengaruh terhadap infrastruktur pembangunan daerah.

Berdasarkan masalah tersebut di atas, maka penulis ingin mengadakan penelitian tentang: **EVALUASI PENGHAPUSAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH (TKD) TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA RSUD KABUPATEN BUOL SULAWESI TENGAH**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai solusi pada permasalahan yang ada di kabupatenBuol.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa penyebab dihapuskannya tunjangan kinerja daerah dikabupaten Buol?
2. Berapa besar pengaruh penghapusan tunjangan kinerja daerah terhadap kineja pegawai RSUD Kabupaten Buol
3. Apakah penghapusan tunjangan kinerja daerah akan berdampak pada pelayanan masyarakat ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Meninjau penyebab kebijakan penghapusan tunjangan kinerja daerah terhadap pegawai RSUD Kabupaten Buol
2. Mengetahui besar pengaruh penghapusan tunjangan kinerja daerah terhadap kineja pegawai RSUD Kabupaten Buol
3. Mengevaluasi dampak penghapusan tunjangan kinerja daerah terhadap pelayanan masyarakat

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan masukan atau bahan pertimbangan bagi pemerintah kabupatenBuoltentang kebijakan penghapusan tunjangan kinerja daerah (TKD).
2. Menambah referensi kajian evaluasi kebijakan pemerintah tentang penghapusan tunjangan kinerja daerah.
3. Bagi penulis dapat menjadi cara belajar dan berfikir sistematis sekaligus sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY)
4. Bagi lembaga-lembaga terkait, penelitian ini diharapkan sebagai informasi dan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dengan penghapusan tunjangan kinerja daerah di Indonesia, terutama di kabupaten Buol Sulawesi Tengah.
5. Bagi masyarakat umum, penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan tentang kebijakan pemerintah terhadap tunjangan kinerja daerah (TKD).

#### **E. Batasan Masalah**

Penelitian tentang penghapusan tunjangan kinerja daerah (TKD) pada dasarnya merupakan hal yang kompleks karena menyangkut kebijakan pemerintah dan menyentuh persoalan birokrasi di daerah. Oleh karena itu dalam penelitian ini, kajian dibatasi pada hal-hal sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya untuk meninjau kebijakan pemerintah tentang penghapusan kinerja daerah (TKD) di kabupaten Buol
2. Fokus kajian dilakukan pada pegawai RSUD kabupaten Buol
3. Menganalisis pengaruh penghapusan tunjangan kinerja daerah (TKD) di kabupaten Buol terhadap pelayanan masyarakat